PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN
Jalan Raja Isa No. 17 Kantor Dinas Bersama lt. IV, Kode Pos 29464
Telepon (0778) 470597, Faksimile (0778) 470596
Laman dispertanahan.batam.go.id, Pos-el dispertanahan@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 4.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM DISTAN

[illegible] OPILAWATI,S.T.
Pembina Tingkat I –IV/b
NIP. 19751212002122004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam
Nomor : 04 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA (TAHUN)					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP PD	Nilai	-	70,01	73,57	74,57	76,57	78,57	80,57
2	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai	-	90,13	90,16	90,19	91,07	92,06	92,10
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	Persentase	-	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
4	Persentase masyarakat Kampung Tua yang mendapat fasilitasi legalitas tanah	Persentase	Jumlah Kampung tua, yang sudah dilakukan fasilitasi legalitas tanah sebanyak 19 Kampung Tua	52,78	66,67	77,78	88,89	97,22	100,00
5	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan	Persentase	-	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
6	Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	Persentase	Jumlah tanah aset pemko batam 845 persil/bidang, yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 487 bidang/persil	73,22	79,31	84,48	89,66	94,83	100,00

Batam, 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

DAHLIA NOPILAWATI, S.T.
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 197511212002122004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam
Nomor : 04 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanahan Kota Batam
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan Daerah sesuai dengan kewenangannya
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
   c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
   d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertahanan sebesar 90,34	- Nilai SAKIP PD sebesar 73,57	Sekretariat
			- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD sebesar 90,16	Sekretariat
2	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	- Persentase legalitas tanah Kota Batam sebesar 47,74%	- Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam sebesar 20,00%	Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan
			- Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah 66,67%	Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
			- Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan 25,00%	Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
			- Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam 79,31%	Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah

Batam, 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

PEMERINTAH KOTA BATAM DISTAN

[redacted]
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. [redacted]